

*Analysis of The Government's Internal Control System and Human Resource Capacity on The Implementation of Good Governance in The Tebo Regency Government With The Quality of Accounting Information as A Mediation Variable*

**Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan *Good Governance* Pada Pemerintah Kabupaten Tebo Dengan Kualitas Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Mediasi**

Oleh:

**Rina Rusdiana<sup>1)\*</sup>, Afrizal<sup>2)</sup>, Ratih Kusumastuti<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2021, Jambi – Indonesia

<sup>2&3)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia

Email: [rinarusdianaalif@gmail.com](mailto:rinarusdianaalif@gmail.com)<sup>1)</sup>, [afrizaldoktor@unja.ac.id](mailto:afrizaldoktor@unja.ac.id)<sup>2)</sup>, [ratihkusumastuti@unja.ac.id](mailto:ratihkusumastuti@unja.ac.id)<sup>3)</sup>

\* Korespondensi

---

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 08 Agustus 2024

Artikel Diterima: 04 November 2024

---

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the government's internal control system and human resource capacity on the implementation of good governance in the Tebo district government with the quality of accounting information as a mediating variable. The sample in the study were officials at the Regional Apparatus Organization (OPD) in the Tebo Regency Government, totaling 100 respondents. The source of the data used in this study is primary data, namely data obtained by field surveys that use all original data collection methods. Data analysis in this study used the Partial Least Square (PLS) approach with the help of the WarpPLS 7.0 software. The results showed that the Government's Internal Control System, Human Resource Capacity and the quality of accounting information had a significant effect on the implementation of Good Governance. The Government Internal Control System and HR Capacity have an effect on the implementation of Good Governance which is mediated by the quality of accounting information, this means that an increase in the effectiveness of the Government Internal Control System and HR Capacity has a significant impact on the quality of accounting information which then has an impact on improving governance in the Government environment Tebo Regency.*

**Keywords:** *Government Internal Control System, Human Resource Capacity, Good Governance, Quality of Accounting Information*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan kapasitas sumber daya manusia terhadap penerapan *good governance* pada pemerintah kabupaten tebo dengan kualitas informasi akuntansi sebagai variabel mediasi. Sampel dalam penelitian yaitu pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang berjumlah 100 responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan software WarpPLS 7.0. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kapasitas SDM dan Kualitas informasi akuntansi berpengaruh yang signifikan terhadap penerapan *Good Governance*. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kapasitas SDM berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance* yang dimediasi oleh kualitas informasi akuntansi hal ini berarti bahwa peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kapasitas SDM memberikan dampak yang signifikan

terhadap kualitas informasi akuntansi yang kemudian berimbas pada peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

**Kata Kunci:** Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, *Good Governance*, Kualitas Informasi Akuntansi.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Era Reformasi menuntut pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, hal ini dilakukan pemerintah untuk melakukan perubahan pada sistem pemerintah yang bertujuan meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan serta memberantas maraknya kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang terjadi dikalangan aparat pemerintah, sistem pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip *good governance* harus didasarkan pada prinsip partisipasi, pemerintah yang berdasarkan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsesus, keadilan, efektifitas, akuntabilitas dan visi strategis. Hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan Mardiasmo (2009) yang menyatakan *good governance* adalah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tingkah laku dan sikap masyarakatnya dilandasi prinsip dan karakter tertentu.

Saat ini pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk lebih memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat melalui tata kelola yang baik. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah, tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki setiap instansi pusat dan daerah untuk melaksanakan kinerjanya dengan prinsip-prinsip *good governance* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, n.d.; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah, n.d.).

Untuk mewujudkannya pemerintah membutuhkan sistem yang dapat membantu dan memberikan motivasi bahwa penyelenggaraan tersebut dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efektif dan efisien dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai tahap pertanggungjawaban. Untuk menindaklanjuti terwujudnya *good governance* maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah PP No 60 tahun 2008 yang merupakan pengembangan UU No 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara (Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, n.d.). Tujuan dari penyelenggaraan SPIP PP No 60 tahun 2008 adalah

1. Mendorong terciptanya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
2. Terciptanya laporan keuangan yang handal
3. Keamanan aset negara
4. Kesesuaian penyelenggaraan pemerintah dengan peraturan yang berlaku

Penerapan SPIP sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia yang memadai, penerapan SPIP memberikan keyakinan yang memadai, dari prinsip tersebut SPIP berfungsi sebagai tolak ukur dalam penerapan *good governance*. Karakter SDM yang dimiliki merupakan salah satu standar kinerja yang digunakan dalam penerapan *good governance* dalam upaya mewujudkan tujuannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut PP No 60 Tahun 2008 terdapat lima unsur dalam penerapan SPIP yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Jika kelima unsur ini telah tercapai maka sistem pengendalian intern pemerintah dapat dikatakan baik. Selain itu, untuk menilai apakah sistem pemerintahan sudah terlaksana dengan baik dan bersih dapat dilihat dari performa aparat pemerintah, karena performa aparat pemerintah sangat berkaitan dengan birokrasi misalnya kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat saat pengurusan surat-surat di instansi pemerintah.

Tata kelola juga dapat terwujud jika dilakukan akuntabilitas. Akuntabilitas dapat mendorong munculnya tekanan bagi pelaku pemerintah untuk lebih bertanggungjawab dan menjamin informasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan publik. Transparansi yang dilakukan secara baik oleh instansi pemerintah dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat. Sampai saat ini penerapan prinsip *good governance* di daerah masih bersifat sloganistik, hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus KKN yang terjadi di daerah, banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah yang berakibat buruknya kinerja pemerintah sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tidak dapat tercapai.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tebo Nomor 3 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Tebo merumuskan sasaran dari tata kelola yang baik (*good governance*) adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi
2. Meningkatnya aspek pengendalian urusan pemerintah.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tebo. Misi memiliki 6 sasaran strategis yang ditetapkan yang disusun dengan target indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut. Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo yang berhubungan dengan misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo dalam Mewujudkan *Good Governance***

No	Sasaran Strategis	Target Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Kriteria
1	Meningkatnya pelaksanaan pemerintah yang bermutu dan bersih dari KKN.	Laporan hasil pemeriksaan reguler.	93%	Sangat Baik
2	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.	Laporan hasil pemeriksaan kasus.	100%	Sangat Baik
3	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan manajemen KDH dalam rangka memberikan peringatan dini dan meningkatkan akuntabilitas program dan kegiatan.	Jumlah rapat koordinasi pengawasan	100%	Sangat Baik
4	Terselesaikannya tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	79%	Sedang
5	Reviu Laporan keuangan dan kinerja Pemda.	Laporan hasil reviu keuangan.	100%	Sangat Baik
6	Evaluasi LKj IP Dinas/Instansi	Jumlah Laporan hasil Evaluasi LKj IP.	100%	Sangat Baik

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tebo, 2020

Tabel di atas menggambarkan bagaimana capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari 6 sasaran strategis yang ditetapkan, terdapat capaian indikator yang tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu berhubungan dengan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional yang hanya mencapai 79% dari target yang ditetapkan. Kondisi tersebut tentunya perlu mendapat perhatian karena sangat mempengaruhi pemenuhan misi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya Perwujudan *good governance* melalui Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tebo masih mengalami kendala dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Hal ini terjadi karena Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN.

Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel.

Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar Reformasi Birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya. Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai bentuk dari Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dapat dielaborasi dalam perencanaan dan program yang nyata. Pemerintah sendiri nampaknya sulit menentukan bentuk dari keberhasilan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, sehingga sulit juga menentukan target-target kinerja. Komponen yang terdapat dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi perlu diterjemahkan menjadi bentuk konkrit yang dapat diimplementasikan dan dicapai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Pemerintah Kabupaten Tebo menyebutkan bahwa faktor kurangnya tenaga dan aparatur yang profesional menjadi salah satu hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100 %). Jumlah SDM bidang pengawasan yang ada saat ini belum memadai untuk melaksanakan pemeriksaan reguler, penanganan kasus dan berbagai tugas pengawasan yang semakin banyak seperti Reviu dan Evaluasi. Untuk saat ini jumlah pengawas fungsional yang ada berjumlah 10 orang, dengan jumlah obrik Kabupaten sebanyak 34 OPD, 12 Kecamatan, 112 Desa, serta Puskesmas, UPTD Dikbudpora dan sekolah setingkat SD/SLTP. Kondisi ini belum sesuai dengan cakupan tugas yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tebo.

Terbatasnya kompetensi aparatur pengawasan yang ada terutama terhadap hal-hal teknis yang memerlukan penanganan khusus. Kondisi ini memerlukan SDM yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi dibidang pengawasan. Kompetensi untuk melakukan pengawasan dibuktikan dengan kemampuan melakukan audit, reviu, evaluasi, investigasi, pemantauan dan pengawasan lainnya, secara formal harus memiliki kompetensi dalam jabatan fungsional

yang tersertifikasi atau terstandarisasi (*certified auditor*) (LKj IP Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2019).

Faktor lain yang menjadi penghambat misi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh Inspektorat maupun BPK merupakan tanda bahwa SPIP belum diselenggarakan secara efektif serta belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh SKPD. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian interen pemerintah.

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun yang lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dibidang pengawasan yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat antara lain Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah, hal ini terjadi karena Adanya tuntutan peningkatan Kapabilitas APIP mengakibatkan fungsi dan kewenangan Inspektorat selaku APIP bertambah. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan pada tahun 2019 Inspektorat selaku APIP sudah berada pada level 3. Kondisi ini harus didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas, alokasi anggaran yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas, alokasi anggaran yang memadai.

Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) melalui kepala BPK RI perwakilan Jambi Hery Ridwan menyatakan bahwa Kabupaten Tebo telah 5 kali berturut-turut memperoleh opini WTP meskipun masih terdapat beberapa catatan yang harus diperbaiki, Adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaanoleh Inspektorat maupun BPK merupakan tanda bahwa SPIP belum diselenggarakan secara efektif serta belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian interen pemerintah. APIP juga di tuntut melaksanakan penilaian maturitas SPIP pada Instansi sesuai dengan target indikator kinerja bidang aparatur Negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

Penelitian mengenai *good governance* telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2017) yang mengadakan penelitian di Kabupaten Rokan Hulu menyatakan bahwa SPIP yang

dilaksanakan di Rokan Hulu telah terlaksana dengan baik. Penelitian ini menekankan adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel kapasitas sumber daya manusia sebagai variabel independen dan variabel kualitas informasi akuntansi sebagai variabel mediasi. Alasan peneliti menambahkan variabel kapasitas sumber daya manusia karena penelitian sebelumnya hanya meneliti bagian sistemnya saja, menurut peneliti sebuah instansi atau organisasi dapat dikategorikan baik tidak hanya dinilai pada sistemnya saja tetapi juga kualitas sumber daya manusianya. Jika kualitas sumber daya manusia baik maka instansi atau organisasi pasti akan lebih baik pula (Winidyaningrum & Rahmawati, 2010). Selain itu, kualitas informasi akuntansi adalah ciri khas dari pemerintahan demokratis modern. Demokrasi tetap menjadi macan kertas jika mereka yang berkuasa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di depan umum atas tindakan dan kelalaian, keputusan, kebijakan, dan pengeluaran mereka. Kualitas informasi akuntansi memiliki implikasi yang positif terhadap tata kelola yang baik (Susanto, 2016).

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap kualitas informasi akuntansi di Kabupaten Tebo.
2. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi akuntansi di Kabupaten Tebo.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi akuntansi terhadap penerapan *Good Governance* di Kabupaten Tebo.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap penerapan *Good Governance* di Kabupaten Tebo.
5. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap penerapan *Good Governance* di Kabupaten Tebo.
6. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi akuntansi dalam memediasi hubungan antara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap penerapan *Good Governance* di Kabupaten Tebo.
7. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi akuntansi dalam memediasi hubungan antar kapasitas sumber daya manusia terhadap penerapan *Good Governance* di Kabupaten Tebo.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu melakukan pengujian hipotesa yang menguji hubungan dan pengaruh diantara variabel yang diteliti. Pemilihan jenis penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kapasitas SDM berpengaruh terhadap penerapan *good governance* yang dimediasi oleh kualitas informasi akuntansi.

**2. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

**2.1. Good Governance**

Secara umum *good governance* diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Maksud kata 'baik' di atas adalah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.

**2.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

**2.3. Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Kapasitas sumber daya manusia merupakan kualitas usaha atau potensi kemampuan yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang, jasa dan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu.

**2.4. Kualitas Informasi Akuntansi**

Informasi akuntansi adalah suatu bagian dari informasi yang diungkapkan terutama dalam istilah keuangan (uang)

**2.5. Hipotesis Penelitian**

- H<sub>1</sub>: Diduga Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi di Kabupaten Tebo
- H<sub>2</sub>: Diduga kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi di Kabupaten Tebo
- H<sub>3</sub>: Diduga kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance* di Kabupaten Tebo
- H<sub>4</sub>: Diduga Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance* di Kabupaten Tebo
- H<sub>5</sub>: Diduga kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance* di Kabupaten Tebo
- H<sub>6</sub>: Diduga kualitas informasi akuntansi memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah terhadap penerapan *Good Governance* di Kabupaten Tebo

H<sub>7</sub>: Diduga kualitas informasi akuntansi memediasi pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap penerapan *Good Governance* di Kabupaten Tebo.

**3. METODOLOGI PENELITIAN**

**3.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif bersifat hubungan *causal explanatory* yang bertujuan mengetahui pola hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen. Penggunaan metode *causal explanatory* sesuai dengan Rancangan atau desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain korelasional. Studi korelasional digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain (Sudjana & Ibrahim, 2007).

**3.2. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini yaitu pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang berfungsi sebagai entitas akuntansi yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga tahap pelaporan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *judgement sampling*, pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Indriantoro & Supomo, 2013). Masing-masing OPD akan diberikan 4 (empat) kuesioner yang akan diisi oleh bendahara dinas terkait, sub bagian keuangan, dan bagian tata usaha/sekretariat dari 25 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

**3.3. Operasional Variabel**

Operasionalisasi variabel menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, konsep, indikator, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam operasionalisasi variabel penelitian. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian.

**Tabel 2. Operasional Variabel**

Variabel	Definisi/Konsep Variabel	Dimensi	Indikator
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X <sub>1</sub> )	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan	1. Lingkungan pengendalian	1) Penegakan integritas dan nilai etika 2) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 3) Peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Variabel	Definisi/Konsep Variabel	Dimensi	Indikator
	seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008)	2. Penilaian resiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan (PP No 60 tahun 2008)	4) Tujuan instansi yang terukur, realistis dan terikat waktu 5) Identifikasi dan analisis resiko 6) Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah 7) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 8) Pengendalian fisik atas aset 9) Mengelola, dan mengembangkan sistem informasi secara terus menerus 10) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern secara periodik 11) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit
Kapasitas Sumber Daya Manusia ( $X_2$ )	Kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi /kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Winidyaningrum & Rahmawati, 2010)	1. Tanggung jawab 2. Kompetensi (Winidyaningrum & Rahmawati, 2010)	1) Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang jelas 2) Deskripsi jabatan yang jelas 3) Kualifikasi pendidikan 4) Pengetahuan 5) Pelatihan keterampilan 6) Kemampuan
<i>Good Governance</i> (Y)	<i>Good Governance</i> adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (KPK, 2016)	1. Partisipasi 2. Tegaknya supremasi hukum 3. Transparansi 4. Daya tanggap 5. Berorientasi pada konsensus 6. Kesetaraan 7. Efektifitas dan efisien 8. Akuntabilitas 9. Visi Strategis (KPK, 2016)	1) Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan 2) Adanya kerangka hukum yang kuat 3) Keterbukaan informasi 4) Kebijakan yang dibuat pemerintah berorientasi pada kepentingan Masyarakat 5) Mempertimbangkan adanya perbedaan kepentingan 6) Kesetaraan dalam pelayanan 7) Pengelolaan sumber daya yang ekonomis, efisien dan efektif 8) Penyusunan laporan 9) Strategi untuk menghadapi masa yang akan datang
Kualitas Informasi Akuntansi (Z)	Kualitas informasi akuntansi adalah informasi akuntansi yang memiliki karakteristik kualitas yang dibutuhkan oleh pemakainya dalam pengambilan keputusan yang berharga untuk mencapai tujuan organisasi (O'Brien & Marakas, 2010).	1. Relevan 2. Ketepatan waktu 3. Akurat 4. Lengkap	1) Informasi sesuai dengan kebutuhan 2) Penyampaian informasi tepat waktu 3) Bebas dari kesalahan material 4) Informasi lengkap sesuai dengan kebutuhan pengguna

Sumber: Data diolah peneliti, 2020

### 3.4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan software WarpPLS 7.0. PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghozali (2011), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari

pendekatan SEM berbasis *kovarian* menjadi berbasis *varian*. Keuntungan dengan menggunakan PLS adalah PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan skala tertentu dan jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011).

Estimasi model memberikan ukuran empiris dari hubungan antara indikator dan konstruk (*measurement*

model), serta antar konstruk (*structural model*) (Kock, 2020). Langkah-langkah analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan software WarpPLS 7.0 yaitu sebagai berikut:

#### 3.4.1. Pengukuran Model (*Measurement Model*)

Pengujian pengukuran model (*measurement model*) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen penelitian. *Measurement model* merupakan model pengukuran untuk menilai konsistensi internal (reliabilitas) validitas konvergen, dan validitas diskriminan (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017).

##### 1. Validitas Konvergen

Pengujian validitas konvergen dilakukan menggunakan nilai *loading faktor*. Menurut Kock (2020), sebuah instrumen pengukuran memiliki validitas konvergen yang baik jika pertanyaan-pertanyaan (atau ukuran lain) yang terkait dengan setiap variabel laten dipahami oleh responden dengan cara yang sama seperti yang dimaksudkan oleh perancang pertanyaan-pertanyaan. Dalam hal ini, dua kriteria direkomendasikan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa model pengukuran memiliki validitas konvergen yang dapat diterima yaitu bahwa *P value* yang terkait dengan nilai *loading* sama dengan atau lebih rendah dari 0,05, dan nilai *loading* faktornya sama dengan atau lebih besar dari 0,5 (Kock, 2020).

Ukuran lain untuk menetapkan validitas konvergen pada level konstruk adalah *average variance extracted (AVE)*. Kriteria ini didefinisikan sebagai nilai tengah rata-rata dari nilai *loading* kuadrat dari indikator yang terkait dengan konstruk (yaitu, jumlah *loading* kuadrat dibagi dengan jumlah indikator). Oleh karena itu, AVE setara dengan komunalitas konstruk. Menggunakan logika yang sama seperti yang digunakan dengan indikator individual, nilai AVE 0s, 50 atau lebih tinggi menunjukkan bahwa, rata-rata, konstruk menjelaskan lebih dari setengah varian indikatornya. Sebaliknya, AVE kurang dari 0,50 menunjukkan bahwa, rata-rata, lebih banyak varian tetap dalam kesalahan item daripada dalam varian yang dijelaskan oleh konstruk (Hair et al., 2017).

##### 2. Validitas Diskriminan

Hair et.al. (2017) mengungkapkan bahwa validitas diskriminan adalah sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lain menurut standar empiris. *Cross-loadings* biasanya merupakan pendekatan pertama untuk menilai validitas diskriminan indikator. Secara khusus, nilai outer loading indikator pada konstruksi terkait harus lebih besar dari semua nilai *cross loading*-nya pada konstruksi lain (Hair et al., 2017).

*Fornell-Larcker criterion* adalah pendekatan kedua untuk menilai validitas diskriminan. Pengukuran ini dilakukan menggunakan perbandingan akar dari AVE dengan korelasi antar variabel laten. Nilai AVE konstruk seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar variabel *laten* (Kock, 2020).

##### 3. Uji Reliabilitas

Kock (2020) mengungkapkan bahwa Reliabilitas adalah ukuran kualitas suatu alat ukur dimana instrumen itu sendiri biasanya berupa seperangkat pernyataan pertanyaan. Sebuah instrumen pengukuran memiliki reliabilitas yang baik jika pertanyaan-pertanyaan (atau ukuran lain) yang terkait dengan setiap variabel laten dipahami dengan cara yang sama oleh responden yang berbeda. Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu *Cronbach's alpha* dan *Composite reliability*. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* dan *Cronbach's alpha* sama dengan atau lebih besar 0,7 (Kock, 2020).

#### 3.4.2. Pengujian Model Struktural (*Structural Model*)

Pengujian model struktural dilakukan untuk melihat hubungan struktural antar variabel laten yang diteliti (Kock, 2020). Setelah reliabilitas dan validitas ditetapkan, kriteria evaluasi utama untuk hasil PLS-SEM adalah koefisien determinasi (nilai  $R^2$ ) serta ukuran dan signifikansi koefisien jalur (Hair et al., 2017). Pengujian model struktural dalam analisis SEM-PLS menggunakan WarpPLS yaitu sebagai berikut:

##### 1. Pengujian signifikansi koefisien jalur

Untuk pengujian hipotesis atas pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dilakukan dengan melakukan perbandingan antara hasil nilai *p value* dari koefisien jalur (*path coefficient*) dengan taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Pengujian dapat dikatakan sangat signifikan apabila *p value* lebih kecil atau sama dengan 0,05 ( $p \text{ value} \leq 0,05$ ).

##### 2. *Effect size f<sup>2</sup>*

Penentuan besarnya pengaruh (*effect size f<sup>2</sup>*) diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu: 0,02 pengaruh kecil, 0,15 pengaruh medium, dan 0,35 pengaruh besar. Nilai di bawah 0,02 menunjukkan efek yang terlalu lemah untuk dianggap relevan dari sudut pandang praktis, bahkan ketika nilai *P* yang sesuai secara statistik signifikan situasi yang mungkin terjadi dengan ukuran sampel yang besar (Kock, 2020).

##### 3. Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel terikat. Hair et.al. (2017) mengungkapkan bahwa koefisien determinasi adalah ukuran kemampuan gabungan variabel laten eksogen memprediksi konstruk variabel endogen, artinya, koefisien mewakili

jumlah varians dalam konstruksi endogen yang dijelaskan oleh semua konstruksi eksogen yang terkait dengannya. Nilai  $R^2$  berkisar dari 0 hingga 1, dengan level yang lebih tinggi menunjukkan level akurasi prediksi yang lebih tinggi. Seperti halnya regresi berganda, koefisien determinasi yang telah disesuaikan (*Adjusted R Square*) digunakan sebagai kriteria untuk menghindari bias terhadap model yang kompleks. Kriteria ini dimodifikasi sesuai dengan jumlah konstruksi variabel eksogen (Hair et al., 2017).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.

##### 4.1. Pengujian *Measurement (Outer) Model*

Analisis ini dilakukan dengan melihat validitas dan reliabilitas dari indikator yang digunakan dalam mengukur variabel laten.

##### 4.1.1. Validitas Konvergen

Menurut Kock (2020), model pengukuran memiliki validitas konvergen yang dapat diterima jika *P value* yang terkait dengan nilai *loadings* sama dengan atau lebih rendah dari 0,05, dan nilai *loading* faktornya sama dengan atau lebih besar dari 0,5. Hasil pengujian validitas konvergen menggunakan metode *outer loading* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. Loading Factor dan Cross Loading**

	SPIP	SDM	KIA	GG	Type (as defined)	SE	P Value
SPIP_01	<b>(0.759)</b>	-0.175	0.061	0.143	Reflective	0.110	<0.001
SPIP_02	<b>(0.738)</b>	-0.124	-0.104	0.009	Reflective	0.103	<0.001
SPIP_03	<b>(0.761)</b>	0.276	-0.215	0.105	Reflective	0.076	<0.001
SPIP_04	<b>(0.741)</b>	0.058	0.352	-0.367	Reflective	0.101	<0.001
SPIP_05	<b>(0.855)</b>	0.003	0.024	0.007	Reflective	0.080	<0.001
SPIP_06	<b>(0.734)</b>	0.213	-0.383	0.075	Reflective	0.092	<0.001
SPIP_07	<b>(0.724)</b>	0.028	-0.579	0.145	Reflective	0.101	<0.001
SPIP_08	<b>(0.804)</b>	-0.014	0.042	-0.079	Reflective	0.101	<0.001
SPIP_09	<b>(0.804)</b>	-0.074	0.360	-0.066	Reflective	0.100	<0.001
SPIP_10	<b>(0.775)</b>	-0.113	0.349	0.030	Reflective	0.086	<0.001
SPIP_11	<b>(0.835)</b>	-0.059	0.023	0.005	Reflective	0.077	<0.001
SDM_01	0.026	<b>(0.823)</b>	0.192	-0.186	Reflective	0.065	<0.001
SDM_02	-0.069	<b>(0.849)</b>	0.254	-0.213	Reflective	0.081	<0.001
SDM_03	0.076	<b>(0.814)</b>	-0.251	0.132	Reflective	0.084	<0.001
SDM_04	-0.048	<b>(0.844)</b>	-0.003	0.037	Reflective	0.071	<0.001
SDM_05	0.220	<b>(0.790)</b>	-0.319	0.198	Reflective	0.088	<0.001
SDM_06	-0.224	<b>(0.708)</b>	0.121	0.055	Reflective	0.101	<0.001
KIA_01	-0.080	-0.106	<b>(0.846)</b>	-0.086	Reflective	0.106	<0.001
KIA_02	-0.247	0.310	<b>(0.831)</b>	0.049	Reflective	0.091	<0.001
KIA_03	0.015	-0.400	<b>(0.716)</b>	0.221	Reflective	0.136	<0.001
KIA_04	0.336	0.151	<b>(0.782)</b>	-0.162	Reflective	0.103	<0.001
GG_01	0.197	-0.098	0.036	(0.731)	Reflective	0.093	<0.001
GG_02	-0.076	-0.021	-0.034	<b>(0.809)</b>	Reflective	0.090	<0.001
GG_03	-0.060	-0.047	0.138	<b>(0.855)</b>	Reflective	0.069	<0.001
GG_04	0.338	-0.097	-0.025	<b>(0.788)</b>	Reflective	0.088	<0.001
GG_05	0.422	0.127	0.024	<b>(0.754)</b>	Reflective	0.090	<0.001
GG_06	-0.056	0.310	0.155	<b>(0.792)</b>	Reflective	0.065	<0.001
GG_07	-0.225	-0.159	-0.131	<b>(0.746)</b>	Reflective	0.098	<0.001
GG_08	-0.224	0.183	0.052	<b>(0.791)</b>	Reflective	0.076	<0.001

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai *loading factor* (nilai yang ada dalam tanda kurung) untuk semua indikator untuk variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, kapasitas SDM, kualitas informasi akuntansi, dan penerapan *good governance* lebih besar dari 0,7 dengan *p value* < 0,001 yang berarti bahwa semua indikator dinyatakan valid dan dapat dipergunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel latennya masing-masing.

Pengukuran validitas konvergen selain menggunakan nilai *loading factor* juga diukur menggunakan *Average Variance Extracted (AVE)*. Nilai *AVE* digunakan untuk mengukur total varians konstruk yang dapat dijelaskan oleh pengukuran yang dilakukan. Nilai yang disarankan adalah lebih besar dari 0,5. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4. Hasil Pengukuran Average Variance Extracted**

Variabel Laten	Average Variance Extracted (AVE)
SPIP	0.603
SDM	0.650
KIA	0.633
GG	0.610

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai AVE pada masing-masing variabel laten lebih besar dari 0,5, yang berarti bahwa semua indikator pada masing-masing variabel laten mampu mengukur dengan baik variabel latennya.

4.1.2. Validitas Diskriminan

Pengukuran validitas diskriminan pertama dilakukan dengan menggunakan *cross loading*. Nilai *cross loading* dapat dilihat pada tabel 3 di atas. Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *loading factor* setiap indikator dengan variabel latennya masing-masing lebih besar daripada nilai *loading factor* dengan variabel laten yang lain. Tidak ada nilai *loading factor* dari setiap indikator terhadap variabel

latennya masing-masing dengan nilai yang lebih rendah dari *loading factor* setiap indikator dengan variabel laten yang lain. Dengan demikian, dari hasil pengujian menggunakan nilai *Cross Loading* menunjukkan bahwa semua indikator memenuhi persyaratan validitas diskriminan.

Pengukuran validitas diskriminan juga dilakukan menggunakan perbandingan akar dari AVE dengan korelasi antar variabel laten. Nilai AVE konstruk seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar variabel *laten* (Kock, 2020). Hasil pengujian validitas *discriminant* menggunakan metode *Fornell-Larcker* yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5. Korelasi Antar Variabel Laten dengan Akar dari AVE**

	SPIP	SDM	KIA	GG
SPIP	<b>0.777</b>	0.599	0.750	0.770
SDM	0.599	<b>0.806</b>	0.622	0.729
KIA	0.750	0.622	<b>0.795</b>	0.742
GG	0.770	0.729	0.742	<b>0.781</b>

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

Hasil perhitungan *WarpPLS 7.0* menunjukkan bahwa nilai akar AVE variabel yang sama lebih tinggi dari pada nilai akar AVE pada variabel yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria uji validitas diskriminan telah terpenuhi. Dengan demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi semua ketentuan uji validitas.

4.1.3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat keandalan semua indikator untuk mengukur suatu konstruk. Konstruk dikatakan reliabel jika memiliki nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* yang tinggi. Nilai yang disarankan untuk nilai *composite reliability* dan *cronbach alphas* sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (Kock, 2020). Nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Nilai Composite Reliability**

Variabel Laten	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
SPIP	0,943	0,934
SDM	0.917	0.891
KIA	0.873	0.805
GG	0.974	0.920

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *composite reliability* pada semua variabel lebih besar dari 0,7. Hal ini berarti bahwa hasil pengukuran pada setiap konstruk reliabel dan mampu menjelaskan dengan baik masing-masing variabel dimaksud. Nilai *cronbach alpha* pada semua variabel lebih besar dari 0,7 yang berarti bahwa semua konstruk reliabel dan

data hasil pengukuran semua indikator untuk mengukur variabel laten dapat diandalkan.

4.2. Pengujian Inner Model

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kapasitas SDM terhadap penerapan *good governance* yang dimediasi oleh kualitas informasi akuntansi sebagai variabel intervening. Oleh karena itu analisis data

dilakukan dengan melihat pengaruh dari variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara langsung terhadap penerapan *good governance* dan secara tidak langsung dengan dimediasi oleh kualitas informasi akuntansi.

#### 4.2.1. Pengujian signifikansi koefisien jalur

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel laten

**Tabel 7. Koefisien Path dan P Value Pengaruh Langsung**

Hubungan	B	P Values	Keputusan
SPIP ->KIA	0.601	<0.001	Signifikan
SDM ->KIA	0.285	0.003	Signifikan
SPIP ->GG	0.372	<0.001	Signifikan
SDM ->GG	0.301	0.002	Signifikan
KIA ->GG	0.302	0.001	Signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

Hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung dapat dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan Tabel 7 dapat dirumuskan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

- Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap kualitas informasi akuntansi dengan nilai *p-value* lebih kecil 0,001. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi.
- Pengaruh kapasitas SDM terhadap kualitas informasi akuntansi dengan nilai *p-value* sebesar 0,003, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian kapasitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi.
- Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap penerapan *good governance* dengan nilai *p-value* lebih kecil dari 0,001. Hal ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$

penelitian. Kriteria yang digunakan yaitu dengan membandingkan nilai *p-value* hasil pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 0,05. Jika *p-value*  $\leq$  0,05, maka hipotesis statistik diterima dengan demikian variabel eksogen berarti berpengaruh signifikan terhadap variabel endogennya.

ditolak. Dengan demikian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*.

- Pengaruh kapasitas SDM terhadap penerapan *good governance* dengan nilai *p-value* lebih kecil dari 0,002. Hal ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian kapasitas SDM berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*.
- Pengaruh kualitas informasi akuntansi terhadap penerapan *good governance* dengan nilai *p-value* sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian kualitas informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*.

Pengujian pengaruh tidak langsung Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kapasitas SDM terhadap penerapan *good governance* yang dimediasi oleh variabel kualitas informasi akuntansi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 8. Koefisien Path dan P Value Pengaruh Tidak Langsung**

Hubungan	$\beta$	P Values	Keputusan
SPIP ->KIA ->GG	0.181	0.001	Signifikan
SDM ->KIA ->GG	0.086	0.023	Signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

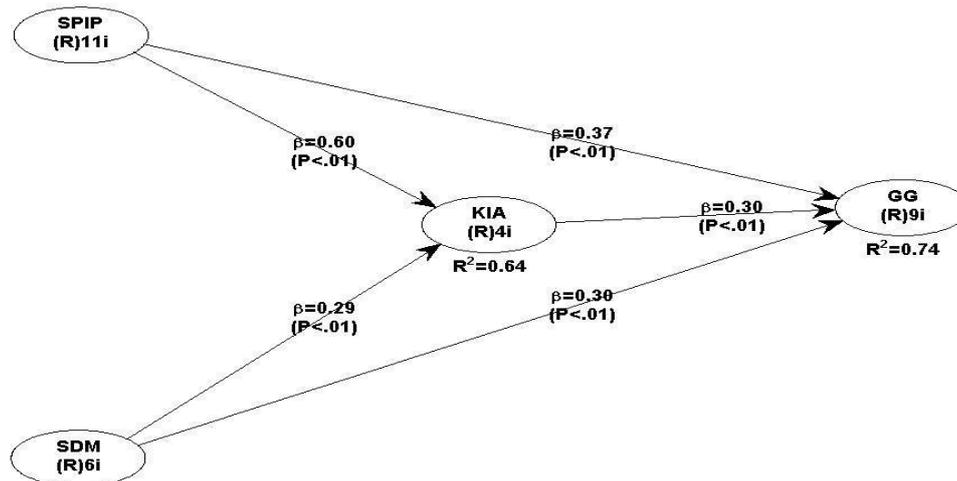
Hasil pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kapasitas SDM terhadap penerapan *good governance* yang dimediasi oleh kualitas informasi akuntansi yaitu sebagai berikut:

- Pengaruh tidak langsung Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap penerapan *good governance* yang dimediasi oleh kualitas informasi akuntansi dengan nilai *p-value* sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap penerapan *good*

*governance* yang dimediasi oleh kualitas informasi akuntansi.

- Pengaruh tidak langsung kapasitas SDM terhadap penerapan *good governance* yang dimediasi oleh kualitas informasi akuntansi dengan nilai *p-value* sebesar 0,0023 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian kapasitas SDM memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap penerapan *good governance* yang dimediasi oleh kualitas informasi akuntansi.

Secara keseluruhan hasil analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

**Gambar 1. Hasil Pengujian Model**

#### 4.2.2. Koefisien Determinasi

Hair et.al. (2017) mengungkapkan bahwa koefisien determinasi adalah ukuran kemampuan

gabungan variabel laten eksogen memprediksi konstruk variabel endogennya. Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9. R-Squared dan Adjusted R Square**

Variabel Endogen	R Square	Adjusted R Square
Kualitas Informasi Akuntansi	0.635	0.627
Penerapan <i>Good Governance</i>	0.741	0.731

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

a. Nilai *R Square* pada model dengan kualitas informasi akuntansi sebagai variabel endogen yaitu pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kapasitas SDM terhadap kualitas informasi akuntansi sebesar 0,635. Hal ini berarti bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kapasitas SDM mampu menjelaskan kualitas informasi akuntansi sebesar  $0,635 \times 100\% = 63,5\%$ , dimana sisanya sebesar 36,5% dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk variabel penelitian.

b. Nilai *R Square Adjusted* dengan penerapan *good governance* sebagai variabel endogen yaitu pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, kapasitas SDM dan kualitas informasi akuntansi terhadap penerapan *good governance* sebesar 0,731. Hal ini berarti bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, kapasitas SDM dan kualitas informasi akuntansi secara bersama-sama mampu menjelaskan kualitas informasi akuntansi sebesar  $0,731 \times 100\% = 73,1\%$ , dimana sisanya sebesar 26,9% dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk variabel penelitian.

**Tabel 10. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Koefisien	P Value	Kesimpulan
H <sub>1</sub>	0.601	<0.001	Diterima
H <sub>2</sub>	0.285	0.003	Diterima
H <sub>3</sub>	0.372	<0.001	Diterima
H <sub>4</sub>	0.301	<0.001	Diterima
H <sub>5</sub>	0.302	<0.001	Diterima
H <sub>6</sub>	0.181	0.001	Diterima
H <sub>7</sub>	0.086	0.023	Diterima

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi yang berarti bahwa peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi Pemerintah Kabupaten Tebo.
2. Kapasitas SDM berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi yang berarti bahwa peningkatan kapasitas SDM dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi Pemerintah Kabupaten Tebo.
3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh yang signifikan terhadap penerapan *Good Governance* yang berarti bahwa peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
4. Kapasitas SDM berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance* yang berarti bahwa peningkatan kapasitas SDM dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
5. Kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance* yang berarti bahwa peningkatan kualitas informasi akuntansi dalam pelaporan keuangan di Kabupaten Tebo dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
6. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance* yang dimediasi oleh kualitas informasi akuntansi yang berarti bahwa peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi yang kemudian berimbas pada peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
7. Kapasitas SDM memiliki pengaruh terhadap penerapan *Good Governance* yang dimediasi oleh kualitas informasi akuntansi yang berarti bahwa peningkatan kapasitas SDM memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi yang kemudian berimbas pada peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

### 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti menyumbangkan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Tebo supaya meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi efektivitas pengendalian internal, mengelola sistem informasi, pemantauan terhadap pengendalian internal dan tindak lanjut hasil audit.
2. Bagi peneliti selanjutnya supaya melakukan penelitian dengan subjek penelitian yang lebih beragam misalnya dengan menggunakan subjek OPD Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Bagi peneliti selanjutnya supaya menggunakan faktor-faktor lainnya sebagai variabel yang mempengaruhi penerapan *good governance* seperti ketidakpastian lingkungan, partisipasi anggaran, kinerja manajerial, budaya organisasi, motivasi kerja dan lain-lain.

## DAFTAR REFERENSI

- Ghozali, I. (2011). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)* (Edisi 3). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) - Joseph F. Hair, Jr., G. Tomas M. Hult, Christian Ringle, Marko Sarstedt*. Sage. Los Angeles: SAGE.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kock, N. (2020). *WarpPLS User Manual Version 7.0*. Texas: ScriptWarp Systems.
- KPK. (2016). *Modul Materi Good Governance dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2010). *Management Information System* (10th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008).
- Sari, W. N. (2017). The Effect of the Local Government Officials Performance, Local Financial Management, Government's Internal Control System, and Organization Commitment on the Good Governance Implementation (Empirical studies on SKPD in Rokan Hulu Regency). *JOM Fekon*, 4(1 (Februari) 2017), 896–910.
- Sudjana, N., & Ibrahim. (2007). *Penelitian dan*

- Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Susanto, A. (2016). The influence of accounting information system quality to accounting information quality and its implications to the good study program governance. *International Business Management*, 10(24), 5767–5776. <https://doi.org/10.3923/ibm.2016.5767.5776>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- Winidyaningrum, C., & Rahmawati. (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Internal Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*.